

Jokowism Between Political Ideology And Metaphors Of Power In Political Polarization In Indonesia

Jokowisme Antara Ideologi Politik Dan Metafora Kekuasaan Dalam Polarisasi Politik Di Indonesia

Oleh

Wahyu Wiji Utomo S.Sos, M.Pem.I
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
wahyuwijiutomo@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Jokowism is a political phenomenon that characterizes the domination and strong influence of President Joko Widodo (Jokowi) in Indonesian politics. This phenomenon involves aspects such as leadership styles, communication strategies, and impact on politics and society. Jokowism reflects public identification with Jokowi and the image of his leadership, with the expression "Jokowi is me" indicating support and personal identification to the president. Although supported, Jokowism also carries negative impacts, such as centralization of power, imbalances in political thinking, political polarization and the risk of personality cults. The research method in this research involves a comprehensive and contextual qualitative approach. With Media Content Analysis related to Jokowism, media content analysis helps to understand how these phenomena are presented and perceived by the wider public. From the results of the research it was found that in some aspects jokowism emerged as a political euphoria and a metaphor of the power of its supporters. Therefore, a deeper understanding of the essence and impact of Jokowism is necessary to maintain a healthy and plural political balance in Indonesia.

Keywords: jokowism, polarization, politics, metaphor, power

ABSTRAK

Jokowisme merupakan fenomena politik yang mencirikan dominasi dan pengaruh kuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam politik Indonesia. Fenomena ini melibatkan aspek seperti gaya kepemimpinan, strategi komunikasi, dan dampak terhadap politik dan masyarakat. Jokowisme mencerminkan identifikasi masyarakat terhadap Jokowi dan citra kepemimpinannya, dengan ungkapan "Jokowi is me" menunjukkan dukungan dan identifikasi pribadi terhadap presiden. Meskipun mendapat dukungan, Jokowisme juga membawa dampak negatif, seperti sentralisasi kekuasaan, ketidakseimbangan pemikiran politik, polarisasi politik dan risiko kultus kepribadian. Metode penelitian dalam penelitian ini melibatkan pendekatan kualitatif yang komprehensif dan kontekstual. dengan Analisis Konten Media yang terkait Jokowisme, Analisis konten media membantu memahami bagaimana fenomena ini dipresentasikan dan dipersepsikan oleh masyarakat luas. Dari hasil penelitian maka ditemukan bahwa dalam beberapa aspek jokowisme muncul sebagai sebuah euforia politik dan metafora kekuasaan para

pendukung nya. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam terhadap esensi dan dampak Jokowiisme diperlukan untuk menjaga keseimbangan politik yang sehat dan plural di Indonesia.

Kata kunci: jokowisme, polarisasi, politik, metafora, kekuasaan

PENDAHULUAN

Sebelum fenomena "Jokowisme" mencuat, panggung politik Indonesia telah diwarnai oleh serangkaian istilah yang mencerminkan dinamika politik yang tegang dan terpolarisasi. Istilah-istilah seperti "cebong," merujuk pada para pendukung Jokowi, "kampret," yang digunakan untuk menyebut pihak yang bersikap oposisi terhadap Jokowi, dan "kadrun," merujuk pada pendukung Prabowo Subianto, telah menjadi bagian dari narasi politik yang membentuk opini dan persepsi publik.

"Cebong" adalah sebutan untuk katak (kecebong) yang diperuntukkan bagi pendukung radikal Joko Widodo yang merupakan calon presiden nomor urut 01, sedangkan "Kampret", adalah sebutan untuk bayi kelelawar yang diperuntukkan bagi pendukung radikal Prabowo Subianto yang merupakan nomor urut calon presiden. 02. dan telah memicu konflik dan polarisasi di masyarakat serta mempengaruhi pola komunikasi yang memanas di media sosial.¹

Pertama-tama, istilah "cebong" digunakan secara umum untuk mengidentifikasi dan merujuk pada pendukung setia Jokowi. Istilah ini tidak hanya menjadi semacam pengenalan bagi mereka yang mendukung kebijakan dan kepemimpinan Jokowi, tetapi juga mencerminkan dinamika perdebatan politik yang sering kali ditandai oleh ketegangan dan persaingan antara kelompok pendukung yang berbeda.

Di sisi lain, istilah "kampret" digunakan sebagai label untuk mereka yang mengkritik dan menentang kebijakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Jokowi. Penggunaan istilah ini mencerminkan adanya perbedaan pendapat yang tajam dan konflik ideologis dalam ranah politik Indonesia.

Selanjutnya, istilah "kadrun" merujuk pada pendukung Prabowo Subianto, lawan politik Jokowi. Istilah ini menciptakan gambaran tentang kelompok yang memiliki pandangan politik yang berbeda dan mendukung figur oposisi. Dalam konteks ini, istilah "kadrun" tidak hanya menjadi semacam gelar untuk para pendukung Prabowo, tetapi juga mencerminkan ketegangan yang melekat antara dua kubu politik yang bersaing. "Kadrun", seringkali digambarkan sebagai kelompok yang selalu menentang kebijakan-kebijakan pemerintah²

Dengan munculnya istilah-istilah ini, tergambarlah suatu panorama politik yang sarat dengan polarisasi dan ketegangan. Istilah-istilah tersebut bukan hanya sekadar label, tetapi juga mencerminkan dinamika kompleks dalam perjalanan politik Indonesia, di

¹ Urai Panzi, Jagad Aditya Dewantara, dan Wibowo Heru, "Beyond the Presidential Threshold : How Cebong and Kampret Political Identities Shape Social Media Discourse," *POLITICON: Jurnal Ilmu Politik* 5, no. 2 (2023): hlm 2.

² Daffa Imam Naufal, Jatmika Nurhadi, dan Dadang Anshori, "KADRUN', KPK, DAN BUZZER DI LINGKUNGAN TEMPO: ANALISIS WACANA KRITIS RUTH WODAK," *JURNAL PENA INDONESIA* *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* 7, no. April (2021): hlm 1.

mana perbedaan pandangan dan konflik ideologis menjadi bagian integral dari proses demokratisasi yang terus berkembang.

Beberapa pihak mencoba untuk mendeskripsikan Jokowiisme adalah sebuah ikhtiar untuk mendefinisikan faham, corak, dan langgam kepemimpinan yang dibangun Jokowi dalam menjalankan pemerintahan. Jokowiisme tidak bisa dipenjarakan dalam definisi Ideologi, entah Sosialisme, Sentrisme, atau Kapitalisme. Jokowiisme bergerak melampaui sekat-sekat ideologi, luwes menyesuaikan diri sesuai keadaan.³

Istilah "Jokowisme" merujuk pada pendukung atau penganut ideologi dan kebijakan yang diidentifikasi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Istilah ini mencakup serangkaian kebijakan, pendekatan politik, dan citra kepemimpinan yang dianggap khas dari pemerintahan Jokowi. Namun istilah seperti "Jokowisme" menciptakan pembagian yang lebih tajam antara pendukung dan oposisi. Masing-masing label mencirikan identitas politik seseorang, menciptakan garis pemisah yang terkadang sulit diatasi. Fenomena ini menciptakan kubu-kubu politik yang saling berseteru, merangkul visi politik yang berbeda-beda.

Polarisasi ini muncul dari perbedaan dalam pandangan terhadap kebijakan, kepemimpinan, dan arah politik nasional. Jokowiisme, sebagai salah satu contoh, mencerminkan penghayatan positif terhadap kepemimpinan Joko Widodo, sementara di sisi lain, istilah-istilah seperti "kampret" mencirikan pandangan kritis atau oposisi terhadap pemerintah.

Ketegangan semakin terasa ketika istilah-istilah tersebut digunakan sebagai senjata retorika dalam percakapan politik. Dialog yang seharusnya menjadi ajang untuk berbagi ide dan mencapai pemahaman bersama seringkali berubah menjadi pertukaran serangan dan retorika yang mempertajam perbedaan. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa konflik ideologis dan polarisasi adalah bagian alami dari dinamika demokrasi. Ini mencerminkan keberagaman pandangan di dalam masyarakat, yang seharusnya menjadi kekuatan untuk mencapai keseimbangan dan progres.

Ditambah lagi menurut sebagian pihak Masa periode kedua Pemerintahan Joko Widodo memiliki persepsi yang keliru terhadap cita-cita reformasi, baik aspek sosial, ekonomi, politik, Pendidikan, demokrasi, HAM, penegakan hukum.⁴ Bagaimanapun, di tengah dinamika politik yang kompleks ini, peran kritis masyarakat dalam mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dan dialog terbuka sangatlah penting. Hanya dengan saling mendengar dan menghargai perbedaan, kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk proses demokratisasi yang sehat dan berkelanjutan.

Inti masalah yang muncul dari penelitian ini adalah polarisasi dan ketegangan dalam panorama politik Indonesia, yang semakin diperumit dengan munculnya istilah-istilah seperti *Jokowisme*. Istilah-istilah ini tidak hanya sekadar label, tetapi juga mencerminkan dinamika kompleks dalam perjalanan politik negara ini. Ketidakefahaman dan konflik ideologis menjadi bagian integral dari proses demokratisasi yang terus berkembang.

³ Budiman Andy, "Memahami Jokowiisme," *PSI*, last modified 2023, <https://psi.id/memahami-jokowisme/>.

⁴ Sri Handayani dan Retna Wardani, "DINAMIKA POLITIK PEMERINTAHAN ERA REFORMASI PADA SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA The Government Political Dynamics Of The Reform Era In Indonesian Constitutional System," *WUJAYA PUTRA LAW RIVIEW* 1, no. 2 (2022): hlm169.

Polarisasi politik yang semakin tajam tercermin dari adanya label-label seperti *Jokowisme* yang mencirikan identitas politik dan memperkuat pembagian antara pendukung dan oposisi. Konflik ini timbul dari perbedaan pandangan terhadap kebijakan, kepemimpinan, dan arah politik nasional. Istilah-istilah tersebut menciptakan kubu-kubu politik yang berseberangan, membentuk garis pemisah yang sulit diatasi.

Ketegangan semakin terasa ketika istilah-istilah tersebut digunakan sebagai senjata retorika dalam percakapan politik. Dialog yang seharusnya menjadi wadah untuk berbagi ide dan mencapai pemahaman bersama berubah menjadi pertukaran serangan dan retorika yang memperdalam perbedaan. Selain itu, konflik ideologis tersebut terlihat semakin kompleks karena melibatkan pandangan yang beragam terhadap kebijakan dan kepemimpinan. Argumen ini barangkali masuk akal, sebabpenyalah-gunaan kekuasaan oleh pimpinan eksekutif memang membuka peluang munculnya pro dan kontra di kalangan masyarakat, sehingga berpotensi untuk memunculkan polarisasi politik⁵

Namun, meskipun masalah polarisasi dan ketegangan ini menciptakan dinamika politik yang sulit, penting untuk diingat bahwa konflik ideologis adalah hal yang wajar dalam konteks demokrasi. Keberagaman pandangan seharusnya menjadi kekuatan untuk mencapai keseimbangan dan progres. Dalam konteks ini, peran masyarakat yang kritis dan terbuka terhadap dialog menjadi krusial untuk membangun fondasi demokratisasi yang sehat. Hanya dengan saling mendengar dan menghargai perbedaan, masyarakat dapat berkontribusi pada pembentukan masa depan politik yang lebih inklusif dan harmonis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif-kualitatif Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagai mana yang dikutip oleh Lexy J. Meleong,⁶ suatu pendekatan yang melibatkan proses penafsiran dan pembahasan realitas sebagai narasi konstruksi sosial. Pendekatan deskriptif-kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan dan juga mampu menginterpretasikan realitas lapangan dari sudut pandang konstruksi sosial yang terlibat. Salah satu metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis konten, di mana peneliti melakukan interpretasi terhadap konten yang dihasilkan oleh objek penelitian

Analisis konten merupakan teknik yang memungkinkan peneliti untuk mendalami realitas dari data yang dihimpun, baik itu berasal dari buku, jurnal, dokumen, dan sumber sekunder lainnya. Pendekatan ini melibatkan tiga tahap utama, yaitu "getting in" untuk memahami dan mengumpulkan data, "getting along" untuk berinteraksi dan meresapi konteks, dan "getting out" untuk menyajikan hasil penelitian dalam bentuk narasi atau deskripsi yang kaya dan mendalam. Hasil dari penelitian ini akan membentuk narasi atau deskripsi yang mencerminkan realitas dari perspektif yang lebih dalam dan autentik.

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Melalui analisis konten dan penerapan metodologi yang tepat, peneliti dapat

⁵ Abdul Gaffar Karim, "Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia : Catatan bagi Agenda Riset" 10, no. 1 (2019): hlm 223.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

menjembatani kesenjangan pengetahuan dan menyajikan interpretasi yang kaya terhadap konstruksi sosial yang terlibat dalam konteks penelitian ini.

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif, yang mencakup tiga komponen kunci: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data melibatkan pengelompokan, pemilihan, dan penyederhanaan informasi yang relevan. Proses selanjutnya adalah penyajian data, di mana hasil analisis dipaparkan dengan jelas dan mendetail. Terakhir, penarikan kesimpulan melibatkan interpretasi hasil analisis dan formulasi kesimpulan yang bersifat kontekstual. Pendekatan ini memberikan ruang untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara penggunaan media massa dan nilai-nilai demokrasi, memberikan kontribusi penting dalam literatur media dan demokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ideologi politik, sebagai serangkaian gagasan dan pandangan tentang organisasi kekuasaan dalam masyarakat, memainkan peran sentral dalam membentuk dan mengarahkan arus politik suatu negara Indonesia, sebagai negara plural dengan berbagai latar belakang budaya dan agama, menyaksikan keragaman ideologi politik. Mulai dari liberalisme yang mendorong kebebasan individu hingga sosialisme yang mengejar distribusi kekayaan yang merata, setiap ideologi mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai yang menjadi dasar pandangan politik. Keragaman ini memberikan warna dan dinamika tersendiri dalam proses pembentukan kebijakan dan perdebatan politik.

Sejarah politik Indonesia mencatat transformasi ideologi yang signifikan. Dari nasionalisme yang mendefinisikan perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi yang menciptakan ruang bagi berbagai ideologi baru, perjalanan ideologi di Indonesia mencerminkan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam terhadap perjalanan ideologi menjadi penting untuk membaca arah kebijakan dan dinamika politik masa depan.

Perbincangan ideologi tentu tidak terlepas dari bagaimana bangunan sebuah ide dan narasi politik yang diserap dari nilai-nilai dan prinsip politik yang visioner dan filosofis.⁷ Tantangan terkait ideologi politik muncul dalam upaya menyatukan pandangan yang beragam dalam sebuah kerangka negara yang inklusif. wawasan berpikir masyarakat mengenai cara ideologi mempengaruhi kebijakan publik dapat memberikan sumbangan yang berharga. Sejalan dengan itu, terbuka pula peluang untuk membentuk diskusi dan narasi yang mendalam guna memahami dampak ideologi politik terhadap pembangunan masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Pergeseran Jokowi dari sekadar seorang pemimpin politik menjadi sebuah ideologi menggambarkan fenomena yang menarik dan bernilai untuk dianalisis secara mendalam. Jokowi dikenal dengan gaya kepemimpinan yang sederhana dan dekat dengan rakyat. Gaya santainya dalam berinteraksi dengan masyarakat menciptakan citra seorang pemimpin yang terbuka dan mudah diakses. Penggunaan media sosial oleh Jokowi,

⁷ Firdaus Syam Hasnu, "IDEOLOGI DAN PARTAI POLITIK: MENAKAR IDEOLOGI POLITIK MARHAENISME PDIP DAN ISLAM MODERAT PKB," *Syntax Idea* 3, no. 7 (2021): 1–15 hlm 2.

khususnya Instagram, untuk membagikan momen sehari-hari dan kegiatan kerja menciptakan hubungan yang erat antara pemimpin dan masyarakat.

Jokowisme merujuk pada fenomena politik yang terkait erat dengan gaya kepemimpinan dan popularitas Joko Widodo atau Jokowi, Presiden Indonesia saat itu. Istilah ini mencakup berbagai aspek, termasuk cara Jokowi memimpin, strategi komunikasinya, dan dampaknya terhadap politik dan masyarakat. Model kepemimpinan politik Joko Widodo yang suka blusukan juga menuai beberapa kritik. Sebagian pihak menganggap blusukan tersebut hanya strategi pencitraan Joko Widodo agardianggap dekat dengan rakyat.⁸

Pada dasarnya, Jokowisme adalah suatu konsep yang mencirikan dominasi dan pengaruh politik yang kuat yang dimiliki oleh Jokowi.

Jokowisme juga mencerminkan sejauh mana presiden tersebut diidentifikasi dengan kebijakan dan program pemerintahannya. Ini tidak hanya sekadar tentang kehadiran fisik Jokowi di panggung politik, tetapi juga tentang bagaimana citra dan narasi politiknya memengaruhi opini publik dan dinamika politik di Indonesia.

Secara lebih pribadi, "Jokowi is me" mengekspresikan dukungan dan identifikasi seseorang terhadap Jokowi dan gaya kepemimpinannya. Ungkapan ini mengindikasikan bahwa seseorang merasa memiliki afinitas yang kuat terhadap Jokowi, mungkin karena pandangan positif terhadap kebijakan-kebijakan yang diimplementasikannya atau koneksi emosional dengan gaya kepemimpinannya.

Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa interpretasi terhadap Jokowisme dan ungkapan "Jokowi is me" dapat bervariasi di antara individu dan kelompok. Beberapa mungkin melihatnya sebagai bentuk dukungan terhadap kepemimpinan yang dianggap efektif, sementara yang lain mungkin mengkritiknya sebagai bentuk kultus kepribadian. Pemahaman lebih lanjut tentang konteks dan nuansa politik di sekitarnya akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena ini.

Popularitas Jokowi juga terbentuk melalui kemampuannya menghadapi tantangan dan krisis dengan kepala dingin. Sikap pragmatismenya dan fokus pada hasil nyata telah meraih dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Dengan pencapaian yang solid dan popularitas yang tinggi, Jokowi menciptakan fenomena yang dikenal sebagai "Jokowisme," di mana kepemimpinannya diakui dan diapresiasi oleh mayoritas rakyat Indonesia. Bagaimana Jokowisme tidak hanya mencakup prestasi dan kebijakan, tetapi juga membangun narasi kepemimpinan yang mendedikasikan diri untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Jokowisme, sebagai sebuah fenomena di ranah politik Indonesia, bukanlah ideologi politik dalam arti tradisional. Namun, konsep ini menciptakan suatu identitas politik yang kuat di sekitar figur Joko Widodo atau Jokowi. Jokowisme mencakup kumpulan nilai, gagasan, dan karakteristik kepemimpinan yang dihubungkan dengan Jokowi, yang melampaui kebijakan atau platform politik tertentu.

Faktor-faktor pendorong identitas Jokowisme melibatkan pencapaian konkrit Jokowi selama kepemimpinannya. Keberhasilannya dalam proyek-proyek infrastruktur, program-program sosial, dan penanganan krisis seperti pandemi COVID-19 memainkan

⁸ A Zulkarnain dan Syamsuddin Harris, "DALAM MODEL KEPEMIMPINAN THE PHENOMENON OF BLUSUKAN IN THE ROLE OF POLITICAL LEADERSHIP OF JOKO WIDODO," *POLITIK: Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan* 13, no. 1 (2017): 1928–1942.

peran penting dalam membentuk citra positif yang melekat pada Jokowiisme. Dalam hal ini, tuturan atau pidato tentang Covid-19, presiden tidak hanya mampu bertutur kata saja, tetapi juga bagaimana menggunakan bahasa yang mampu mempersuasi, mampu diterima, dan diterapkan yang menjadi keinginannya melalui “sandisandi” saat interaksi.⁹ Keberhasilan ini menjadi fondasi bagi pengikutnya untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari "gerakan" atau "ideologi" ini.

Meskipun Jokowiisme menciptakan identitas yang kuat, tantangan utama adalah dalam menetapkan ciri-ciri yang jelas dan konsisten dari ideologi ini. Karena Jokowiisme lebih bersifat personal dan kurang berfokus pada sejumlah prinsip politik yang spesifik, hal ini membuka ruang untuk interpretasi yang beragam di kalangan pengikutnya. Oleh karena itu, menetapkan dasar ideologis yang jelas menjadi langkah krusial untuk keberlanjutan Jokowiisme sebagai fenomena politik.

Penting untuk memahami implikasi Jokowiisme terhadap proses demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, fenomena ini dapat merangsang partisipasi politik dan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Di sisi lain, terlalu mengidentifikasi diri dengan satu tokoh dapat mengaburkan wawasan kritis dan perdebatan ideologis yang sehat, yang esensial dalam konteks demokrasi yang dinamis.

Media sosial memainkan peran kunci dalam pembentukan dan penyebaran Jokowiisme. Jokowi aktif menggunakan platform seperti Instagram untuk membangun citra yang dekat dengan rakyat. Namun, tantangan muncul dalam memastikan bahwa popularitas di media sosial tidak menggantikan diskusi politik yang substansial.

1. Metafora Kekuasaan

Metafora kekuasaan merujuk pada penggunaan bahasa atau konsep yang menggambarkan kekuasaan secara tidak harfiah. Dalam konteks Jokowiisme, istilah ini menciptakan suatu gambaran tentang karakteristik kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dengan menggunakan kiasan atau perbandingan.

Jokowisme, selain menjadi ideologi politik, juga mengekspresikan dirinya melalui dimensi metafora kekuasaan. Joko Widodo, atau Jokowi, secara konsisten membangun citra kepemimpinan yang kuat dengan memanfaatkan simbol-simbol yang mencerminkan kedekatan dengan rakyat. Salah satu contohnya adalah penggunaan pakaian sederhana, yang dianggap sebagai simbol kesederhanaan dan keterhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pilihan ini menciptakan narasi kekuasaan yang berbeda dari tradisi politik yang mungkin terkesan distansial.

Penting untuk dicatat bahwa dimensi metafora kekuasaan dalam Jokowiisme juga tercermin dalam gaya kepemimpinan yang merakyat. Jokowi sering kali melakukan kunjungan langsung ke masyarakat, berinteraksi secara langsung dengan warga, dan mendengarkan aspirasi mereka. Tindakan ini menciptakan kesan bahwa kekuasaan bukanlah sebuah entitas yang terpencil, tetapi sesuatu yang dapat dirasakan dan dimengerti secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, Jokowiisme bukan hanya

⁹ Agik Nur et al., “BAHASA PRESIDEN JOKO WIDODO SELAMA PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF METADISOURSE KEN HYLAND President Joko Widodo ’ s Language during the Covid-19 Pandemic : Ken Hyland ’ s Metadiscourse Perspective,” *SALINGKA Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra* 19, no. 1 (2022): hlm 3.

sebuah ideologi politik, tetapi juga sebuah narasi kekuasaan yang mencoba merangkul dimensi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Ketika simbol-simbol seperti pakaian sederhana dan kunjungan langsung diartikan sebagai representasi kekuasaan yang mendekati rakyat, hal ini dapat memperkuat citra Jokowi sebagai pemimpin yang peduli dan terhubung dengan kebutuhan rakyatnya. Namun, pada saat yang sama, interpretasi ini juga memunculkan pertanyaan kritis tentang sejauh mana simbolisme ini mencerminkan substansi dari kebijakan dan tindakan pemerintahan. Dalam menggali makna Jokowiisme, penting untuk melihat lebih dari sekadar dimensi simbolis dan mempertimbangkan implementasi kebijakan konkret yang dapat memengaruhi kesejahteraan rakyat secara lebih substansial.

Pembentukan metafora ini bukanlah sebuah kiasan saja namun pada prakteknya memang Jokowi terkadang menggunakan berbagai media yang merujuk pada kebijakan positif yang dibangun atas nama Jokowi, dimana sebenarnya berbagai pembangunan pada bidang infrastruktur tidak akan bisa dibangun bila tidak ada Jokowi, dan terkadang hal tersebut dinarasikan langsung oleh Jokowi sendiri dengan Meninjau teks pidatonya mengungkapkan bahwa taktik kebijakan positif yang paling sering digunakan presiden adalah dengan menarik minat audiens dan memanfaatkan penanda identitas dalam kelompok. Taktik ini sering digunakan oleh pembicara yang menggunakan metode “presentasi langsung” untuk meningkatkan minat audiens.¹⁰

Disisi lain Jokowiisme, seolah menjadi simbol politik, sebenarnya bukanlah metafora kekuasaan yang dapat dengan mudah dijelaskan atau ditempatkan dalam kerangka tertentu. Analisis yang kritis mengungkap bahwa *Jokowisme* lebih merupakan konsep politik yang kontroversial daripada metafora yang jelas. Pernyataan ini muncul dari sudut pandang bahwa fenomena ini sebenarnya lebih bersifat delusional, menciptakan ilusi tentang perpanjangan dinasti politik yang menguntungkan kelompok tertentu. Dan hal ini bisa dijelaskan dalam beberapa aspek

1. *Absennya Dasar Konseptual*: *Jokowisme* tidak memiliki dasar konseptual yang jelas atau panduan ideologis. Sebaliknya, fenomena ini terasa lebih seperti kesetiaan yang sangat personal terhadap sosok Joko Widodo tanpa memandang secara kritis kebijakan atau visi politik yang diusungnya. Kekurangan landasan ideologis ini menjadikan *Jokowisme* lebih sebagai ikon personal daripada gerakan politik yang kohesif.

2. *Potensi Perpanjangan Dinasti Politik*: Kritikus *Jokowisme* menyoroti potensi perpanjangan dinasti politik sebagai dampak dari fenomena ini. Dalam perspektif ini, *Jokowisme* tidak hanya menciptakan kesetiaan terhadap Jokowi tetapi juga membuka pintu bagi dominasi politik yang berkepanjangan oleh kelompok tertentu yang terafiliasi dengannya. Hal ini dapat merusak prinsip demokrasi dan mengurangi keberagaman politik. Hal ini bisa saja terjadi karena ada juga pendapat yang berargumen bahwa dinasti politik dapat membawa kestabilan politik dan kontinuitas kebijakan. Keluarga politik yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam urusan politik dapat memberikan kestabilan dan konsistensi dalam pengambilan keputusan.¹¹

¹⁰ Ema Eliyana dan Ani Susanti, “INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT: POLITENESS STRATEGY IN THE SPEECH OF THE INDONESIAN PRESIDENT, JOKOWI,” *CaLLs* 9, no. 2 (2023): hlm 211.

¹¹ Mohammad Taslim Lapungge, Ainun Arsi, dan St Junaeda, “Antara Keturunan Dan Kepemimpinan: Menilik Dinasti Politik Kota Makassar Melalui Lensa Antropologi Politik Dalam Konteks Calon Pemimpin Daerah,” *JSI Jurnal Socia Logica* 3, no. 2 (2023): hlm 6.

3. *Delusi Politik*: Terminologi *delusional politik* muncul karena *Jokowisme* kadang-kadang menciptakan ilusi tentang keberhasilan mutlak dan kehebatan tanpa mempertimbangkan secara kritis kebijakan dan tindakan pemerintah. Kelebihan pujian terhadap sosok pemimpin dapat memunculkan distorsi dalam penilaian objektif terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

4. *Menguntungkan Beberapa Pihak Saja*: Kritik terhadap *Jokowisme* juga menyoroti bahwa fenomena ini cenderung menguntungkan beberapa pihak saja, khususnya kelompok atau individu yang dekat dengan kekuasaan. Sebagai hasilnya, kebijakan yang diambil mungkin lebih bersifat selektif, meninggalkan kebutuhan dan aspirasi sebagian masyarakat.

5. *Kebilangan Keterbukaan dan Kritisisme*: Kesetiaan yang sangat kuat terhadap *Jokowisme* dapat menghambat keterbukaan dan kritisisme terhadap pemerintah. Masyarakat yang terlalu terpaku pada konsep ini mungkin enggan atau takut untuk mengajukan pertanyaan yang kritis, menghancurkan dasar demokrasi yang seharusnya mengedepankan partisipasi dan dialog yang sehat.

Penutup: *Jokowisme*, meskipun dianggap sebagai metafora kekuasaan, memberikan ruang bagi kritik dan perdebatan yang perlu diperhatikan. Analisis kritis terhadap fenomena ini mendukung perlunya masyarakat untuk tetap waspada, mempertahankan keterbukaan, dan mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang seimbang. Sebuah metafora yang dapat meretas, lebih dari sekadar menggambarkan kekuasaan, tetapi juga merefleksikan dinamika kompleks dalam politik kontemporer Indonesia.

2. Gagal menyederhanakan pemikiran

Berbagai tafsir terhadap fenomena politik sering kali memiliki satu kelemahan mendasar, yaitu kegagalan dalam memahami kompleksitas cara kerja kekuasaan. Kritik ini terutama muncul ketika pendekatan terlalu bersifat ideologis, dengan mereduksi proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi pemahaman yang sempit, terbatas, dan terkungkung oleh suatu ideologi tertentu. Kelemahan ini dapat ditemukan dalam berbagai interpretasi fenomena politik, terutama ketika dipandang melalui kaca mata ideologi pada era yang, sejak lebih dari setengah abad lalu, oleh Daniel Bell diramalkan sebagai "The End of Ideology."

Salah satu kegagalan terbesar dalam berbagai tafsir ideologis adalah ketidakmampuannya untuk mencakup seluruh spektrum kompleksitas kekuasaan. Dalam dunia yang semakin kompleks dan dinamis, fenomena politik tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu lensa ideologis saja. Pemahaman yang terlalu terpaku pada suatu ideologi cenderung mengabaikan faktor-faktor penting lainnya yang turut membentuk keputusan politik.

Selain itu, mereduksi proses pengambilan keputusan hanya pada satu paradigma ideologis dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam menganalisis dan merespon perubahan zaman. Dalam era "The End of Ideology" yang diantisipasi oleh Daniel Bell, pandangan bahwa ideologi sebagai pemahaman utama terhadap politik telah kehilangan relevansinya. Dunia modern menuntut ketidakberpihakan dan keuletan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terus-menerus.¹²

¹² DANIEL BELL, *THE END OF IDEOLOGY On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties* (CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, AND LONDON, ENGLAND: Harvard University Press, 1960).

Tidak dapat diabaikan bahwa ideologi memiliki peran penting dalam membentuk pandangan dan tindakan politik. Namun, menggambarkan fenomena politik secara eksklusif melalui satu ideologi saja dapat menyebabkan kehilangan nuansa dan kompleksitas yang sebenarnya. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik dan terbuka terhadap berbagai faktor yang memengaruhi kekuasaan dianggap lebih relevan dalam konteks politik modern.

Dengan memiliki kesadaran akan keterbatasan tafsir ideologis dan menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kekuasaan dapat menjadi kontribusi yang berharga. Dengan demikian, analisis yang lebih holistik dan kontekstual dapat membantu membuka wawasan baru dalam memahami fenomena politik yang terus berkembang di era kontemporer ini.

Dalam mengkritisi ideologi Jokowiisme, perlu diperhatikan bahwa ada kecenderungan euforia publik untuk mengangkatnya menjadi sebuah ideologi tanpa pemahaman yang mendalam terkait esensinya. Di satu sisi, ada kekurangan dalam menggali nilai dan prinsip dasar yang seharusnya menjadi fondasi ideologi ini. Pertanyaan mendasar muncul, apakah ideologi Jokowiisme hanya mencerminkan pemikiran dan visi Joko Widodo sendiri, atau apakah terdapat nilai-nilai universal yang ingin diangkat untuk menjadi dasar ideologinya.

Penting untuk menyoroti bahwa kegagalan dalam menyederhanakan pemikiran ideologi politik tertentu, seperti Jokowiisme, dapat merugikan pemahaman masyarakat terhadap hakikat ideologi tersebut. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai nilai, prinsip, dan tujuan yang diusung oleh Jokowiisme, risikonya adalah ideologi tersebut menjadi semacam "kosong" dalam konteks konseptual. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mendalami substansi ideologi ini agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perdebatan dan perkembangan ideologi politik di Indonesia.

Pentingnya memahami esensi ideologi Jokowiisme tidak hanya berkaitan dengan kejelasan makna, tetapi juga dengan daya unguhnya sebagai dasar pemikiran politik. Dalam menghadapi tantangan politik dan sosial, ideologi yang kuat dapat menjadi pendorong perubahan yang positif. Oleh karena itu, mendefinisikan kembali dan merumuskan esensi ideologi Jokowiisme menjadi sebuah kebutuhan untuk memastikan bahwa konsep tersebut dapat memberikan panduan yang jelas dan bermanfaat dalam mengarahkan perjalanan politik Indonesia.

Fenomena *Jokowisme* menimbulkan pertanyaan kritis tentang keberadaan ideologi yang sesungguhnya di balik euforia publik. Meskipun terdapat dorongan kuat untuk menjadikan *Jokowisme* sebagai sebuah ideologi, dalam realitasnya, kita belum sepenuhnya dapat menemukan dasar konseptual yang jelas yang mendukungnya. Euforia publik yang berkembang tampaknya lebih merupakan hasil dari popularitas dan figur Joko Widodo sebagai pemimpin yang dihormati, daripada ekspresi yang terstruktur dari nilai-nilai ideologis yang terdefinisi dengan baik.

Kita harus mencari jawaban terkait dengan esensi dan nilai-nilai yang mendasari *Jokowisme* sebagai sebuah ideologi. Pertanyaan kunci muncul: apakah ini benar-benar mencerminkan pemikiran Joko Widodo sendiri ataukah lebih merupakan respons terhadap aspirasi dan keinginan masyarakat? Pengidentifikasian nilai atau agenda khusus yang diusung oleh *Jokowisme* menjadi penting untuk memahami titik sentral ideologi ini.

Kekurangan dasar konseptual yang jelas dalam *Jokowisme* juga menggambarkan tantangan dalam mengartikulasikan makna dan tujuan ideologi tersebut. Belum adanya

definisi yang konsisten dan terperinci mengenai nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diusung dapat menyebabkan euforia publik yang lebih bersifat emosional daripada rasional.

Dalam konteks ini, peran media dan narasi politik turut memainkan peran penting. Bagaimana citra *Jokowisme* dibangun dan diinterpretasikan oleh masyarakat melalui media dan narasi politik akan mempengaruhi pemahaman kolektif terkait ideologi ini. Dengan demikian, perlu kewaspadaan untuk membedakan antara popularitas pribadi dan dasar ideologis yang kuat di balik *Jokowisme*.

3. Polarisasi Politik Di Indonesia

Polarisasi politik adalah fenomena di mana masyarakat terbagi menjadi dua kelompok atau lebih yang memiliki perbedaan pendapat dan keyakinan yang sangat tajam dalam hal isu-isu politik tertentu. Polarisasi menciptakan jurang yang mendalam antara kelompok-kelompok ini, sehingga mereka cenderung memiliki pandangan yang bertentangan dan sulit untuk mencapai kesepakatan atau kompromi. Dapat disimpulkan bahwa polarisasi politik merujuk kepada terpecahnya masyarakat akibat adanya perbedaan pilihan politik, yang mana dalam perpecahan ini muncul rasa saling tidak percaya dan kebencian, sehingga memunculkan permusuhan.¹³

Polarisasi politik yang semakin menguat di Indonesia menjadi pemicu utama terjadinya perpecahan yang dalam di antara masyarakat. Perbedaan yang sudah ada, seperti perbedaan agama, keyakinan, suku, dan unsur SARA lainnya, semakin diperburuk oleh polarisasi politik yang semakin tajam. Namun, yang menambah kompleksitas permasalahan adalah adanya perbedaan ideologi yang semakin menjadi sumber utama ketidaksepakatan. Semua dinamika ini semakin terperinci dengan munculnya perspektif baru mengenai *Jokowisme*.

Pertama-tama, perbedaan ideologi menjadi penyebab utama perpecahan, seiring dengan meningkatnya identifikasi politik di kalangan masyarakat. Ideologi tidak hanya menciptakan batas pandang yang tegas, tetapi juga menjadi dasar bagi terbentuknya kelompok-kelompok dengan visi dan misi yang berbeda. Pandangan terhadap kebijakan pemerintah, pandangan terhadap arah negara, dan penilaian terhadap kepemimpinan menjadi sumber konflik yang signifikan.

Perbedaan agama, keyakinan, dan suku, yang sebelumnya menjadi pemicu perpecahan, kini semakin diperparah oleh identifikasi ideologis. Masyarakat menjadi lebih cenderung berkumpul bersama dengan mereka yang memiliki pandangan politik yang serupa, memperkuat echo chamber dan meningkatkan ketidakmampuan untuk mendengar sudut pandang yang berbeda. Ini menciptakan suasana sosial yang sarat dengan konflik dan ketegangan.

Dalam konteks ini, munculnya *Jokowisme* sebagai perspektif baru menambahkan dimensi baru dalam dinamika politik. Meskipun pada awalnya mungkin bertujuan untuk mempersatukan pendukung Jokowi, namun seiring waktu, istilah ini menjadi simbol ketidaksetujuan bagi kelompok oposisi. *Jokowisme* menciptakan identitas politik yang kuat,

¹³ Ibnu Chaerul Mansyur, "Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka," *Jurnal Politik Profetik* 11, no. 1 (2023): hlm 5

sering kali dihadapkan dengan resistensi dari kelompok yang memiliki pandangan politik berbeda.

Penting untuk diakui bahwa perpecahan politik dan polarisasi bukanlah fenomena yang dapat dihindari sepenuhnya dalam konteks demokrasi. Namun, memahami sumber-sumber perpecahan ini, terutama yang berasal dari ideologi, adalah langkah penting dalam upaya untuk meredakan ketegangan dan membangun dialog yang konstruktif di antara masyarakat.

Adanya *Jokowisme*, meskipun mendapat dukungan signifikan dari sebagian masyarakat, juga membawa sejumlah dampak negatif yang perlu diperhatikan. Beberapa dampak tersebut termasuk:

1. **Kekuatan Sentralisasi Kepemimpinan:** *Jokowisme* dapat memperkuat sentralisasi kekuasaan di sekitar figur Joko Widodo. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan sistem pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Sentralisasi kekuasaan yang berlebihan dapat merugikan proses partisipatif dan akuntabilitas di tingkat lokal.
2. **Ketidakseimbangan Pemikiran Politik:** Fenomena *Jokowisme* dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam ekosistem politik dengan menonjolkan satu figur politik di atas lainnya. Hal ini dapat merugikan keberagaman opini dan perspektif dalam politik Indonesia, mengingat pentingnya pluralitas dalam membangun masyarakat demokratis.
3. **Ketidakseimbangan Media dan Opini Publik:** Dominasi *Jokowisme* dalam politik juga dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam ruang media dan opini publik. Media yang terlalu terfokus pada satu figur politik dapat kehilangan objektivitasnya, sedangkan opini publik mungkin terpolarisasi dan kurang mendiskusikan alternatif politik.
4. **Risiko Kultus Kepribadian:** *Jokowisme* dapat memberikan risiko berkembangnya kultus kepribadian, di mana dukungan terhadap Joko Widodo tidak hanya berlandaskan pada pertimbangan rasional terhadap kebijakan, tetapi juga pada pengagungan pribadi terhadap pemimpin itu sendiri. Hal ini dapat merugikan proses kritis dan evaluasi yang seharusnya menjadi bagian integral dari politik demokratis.
5. **Pembatasan Perdebatan Politik:** Dalam atmosfer *Jokowisme* yang dominan, mungkin ada kecenderungan untuk membatasi perdebatan politik yang seharusnya terbuka dan dinamis. Orang mungkin cenderung menghindari kritik atau pemikiran yang berlawanan, menghambat pertukaran ide dan gagasan yang sehat untuk kemajuan politik.
6. **Perluasan atau Penyempitan Ruang Demokrasi:** Tantangan terakhir adalah menilai apakah *Jokowisme* akan memperluas ruang demokrasi dengan meningkatkan partisipasi dan keterlibatan publik, atau sebaliknya, akan menyempitkan ruang demokrasi dengan mengkonsolidasikan kekuasaan pada satu figur sentral. Evaluasi kritis terhadap perkembangan ini penting untuk mengamati dampak *Jokowisme* dalam konteks pembangunan demokrasi di Indonesia.

Jokowisme sebagai fenomena politik memiliki dampak yang signifikan dalam nama dan kekuatan politik, terlepas dari perubahan dinamika partai. Terutama menarik untuk dicatat bahwa setelah Joko Widodo keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(PDIP), dukungan politik terhadapnya tidak hanya bertahan tetapi justru menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Keberlanjutan dukungan ini mengungkapkan bahwa para loyalis Jokowi memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap perubahan politik, sebuah fenomena yang mungkin tidak begitu diantisipasi oleh banyak pihak. Sebagai contoh Dua relawan Wali Kota Medan Bobby Nasution mundur dari struktural dan batal menjadi bacaleg PDIP. Alasannya karena mengikuti jejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.¹⁴

Hal ini juga mencerminkan semakin tajamnya perselisihan antar elite politik yang mencari momentum dan mengamankan posisinya di tahun 2024 ketika Jokowi tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai presiden. Bisa dibayangkan akan terjadi gesekan antar kekuatan elite yang berebut memulai kampanye dan mengamankan diri menjelang tahun 2024.¹⁵

Fenomena ini mencerminkan kedalaman dan konsistensi dukungan terhadap figur Joko Widodo di kalangan para pendukungnya. Dalam banyak kasus, ketika seorang pemimpin keluar dari partai atau mengalami perubahan politik, dukungan dari basis pendukungnya bisa saja melemah atau bahkan hilang. Namun, dalam konteks *Jokowisme*, tampaknya hal ini tidak berlaku. Para pendukung Jokowi menunjukkan tingkat loyalitas dan ketahanan yang tinggi terhadap pemimpin mereka, bahkan setelah perubahan keanggotaan partai.

Dukungan yang berlanjut ini juga mencerminkan dinamika pergeseran politik di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa para loyalis Jokowi mungkin lebih bersifat independen dan lebih fokus pada sosok pemimpin daripada afiliasi partai. Fenomena ini membuka kemungkinan bahwa para pendukung Jokowi tidak hanya melihatnya sebagai representasi dari satu partai tertentu, tetapi lebih sebagai pemimpin yang mewakili nilai dan aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat.

Penting untuk diungkapkan bahwa ketahanan para loyalis Jokowi terhadap perubahan politik ini tidak hanya bersifat spekulatif, melainkan tercermin dalam perilaku politik nyata. Dukungan yang tetap kuat setelah keluar dari PDIP memberikan bukti konkrit bahwa *Jokowisme* tidak hanya sekadar tren sementara, tetapi telah mengakar kuat dalam dinamika politik Indonesia. Dalam rangka memahami *Jokowisme* sebagai ideologi politik, perlu ditekankan bahwa interpretasi dan analisis yang cermat diperlukan untuk melihat dampak positif dan negatifnya terhadap kehidupan politik dan demokrasi Indonesia.

KESIMPULAN

Polarisasi politik yang melibatkan fenomena "Jokowisme" menjadi pusat perdebatan intens di ranah politik Indonesia. Para pendukung Jokowi, yang sering disebut sebagai loyalis Jokowi, dan oposisi terkadang terlibat dalam pertentangan keras yang mencerminkan perpecahan pandangan politik. Sebagai contoh, isu-isu krusial

¹⁴ Nizar Aldi, "Alasan Relawan Bobby Mundur dari PDIP: Kita Jokowiisme, Dukung Prabowo-Gibran," *detiknews.com*, last modified 2023, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7005474/alasan-relawan-bobby-mundur-dari-pdip-kita-jokowisme-dukung-prabowo-gibran>.

¹⁵ Wijayanto dan Nurul Hasfi, "Interpreting the Anger of President Joko Widodo : An Analysis in the Perspective of Javanese Political Culture," *Proceedings of the 5th International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries* (2020): hlm 4.

seperti kebijakan ekonomi, hak asasi manusia, dan lingkungan dapat memicu polarisasi di mana pendukung Jokowi dan oposisi menunjukkan perbedaan pandangan yang signifikan.

Polarisasi politik dalam konteks "Jokowisme" juga terkait erat dengan narasi yang dibangun di sekitar kepemimpinan Jokowi. Terdapat persepsi yang sangat beragam tentang arah kebijakan dan dampak pemerintahan Jokowi. Beberapa melihatnya sebagai pemimpin progresif yang mendorong pembangunan infrastruktur dan ekonomi, sementara yang lain merasa kebijakan-kebijakannya kontroversial dan tidak memadai dalam menangani isu-isu kritis.

Dalam konteks polarisasi politik yang melibatkan "Jokowisme," media sosial sering menjadi arena utama di mana perbedaan pandangan dipertegas. Tagar-tagar dan meme sering digunakan untuk menyuarakan dukungan atau kritik terhadap Jokowi, menciptakan suasana politik yang semakin terpecah belah. Kesadaran akan polarisasi ini penting untuk memahami dinamika politik Indonesia dan mempromosikan dialog yang konstruktif dalam rangka mencapai kesepakatan yang lebih baik di antara berbagai pihak.

Memahami fenomena ini dapat membuka jalan untuk analisis mendalam terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat ketahanan dan keberlanjutan dukungan politik. Hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang perilaku politik masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks hubungan antara pemimpin dan basis pendukungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, Nizar. "Alasan Relawan Bobby Mundur dari PDIP: Kita Jokowiisme, Dukung Prabowo-Gibran." *detiknews.com*. Last modified 2023. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7005474/alasan-relawan-bobby-mundur-dari-pdip-kita-jokowisme-dukung-prabowo-gibran>.
- Andy, Budiman. "Memahami Jokowiisme." *PSI*. Last modified 2023. <https://psi.id/memahami-jokowisme/>.
- BELL, DANIEL. *THE END OF IDEOLOGY On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties*. CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, AND LONDON, ENGLAND: Harvard University Press, 1960.
- Eliyana, Ema, dan Ani Susanti. "INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT : POLITENESS STRATEGY IN THE SPEECH OF THE INDONESIAN PRESIDENT, JOKOWI." *CaLLs* 9, no. 2 (2023): 197–214.
- Handayani, Sri, dan Retna Wardani. "DINAMIKA POLITIK PEMERINTAHAN ERA REFORMASI PADA SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA The Government Political Dynamics Of The Reform Era In Indonesian Constitutional System." *WUJAYA PUTRA LAW RIVIEW* 1, no. 2 (2022): 156–169.
- Hasnu, Firdaus Syam. "IDEOLOGI DAN PARTAI POLITIK: MENAKAR IDEOLOGI POLITIK MARHAENISME PDIP DAN ISLAM MODERAT PKB." *Syntax Idea* 3, no. 7 (2021): 1–15.
- Karim, Abdul Gaffar. "Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia : Catatan bagi Agenda Riset" 10, no. 1 (2019): 215–228.
- Lapungge, Mohammad Taslim, Ainun Arsi, dan St Junaeda. "Antara Keturunan Dan Kepemimpinan: Menilik Dinasti Politik Kota Makassar Melalui Lensa Antropologi Politik Dalam Konteks Calon Pemimpin Daerah." *JSI Jurnal Socia Logica* 3, no. 2 (2023): 1–8.
- Mansyur, Ibnu Chaerul. "Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka." *Jurnal Politik Profetik* 11, no. 1 (2023): 1–22.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Naufal, Daffa Imam, Jatmika Nurhadi, dan Dadang Anshori. "'KADRUN', KPK, DAN BUZZER DI LINGKUNGAN TEMPO: ANALISIS WACANA KRITIS RUTH WODAK." *JURNAL PENA INDONESIA Jurnal Babasa, Sastra, dan Pengajarannya* 7, no. April (2021): 1–18.
- Nur, Agik, Agus Purnomo, Ahmad Putikadyanto, dan Iswah Adriana. "BAHASA PRESIDEN JOKO WIDODO SELAMA PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF METADISCOURSE KEN HYLAND President Joko Widodo ' s Language during the Covid-19 Pandemic : Ken Hyland ' s Metadiscourse Perspective." *SALINGKA Majalah Ilmiah Babasa dan Sastra* 19, no. 1 (2022): 1–13.
- Panzi, Urai, Jagad Aditya Dewantara, dan Wibowo Heru. "Beyond the Presidential Threshold: How Cebong and Kampret Political Identities Shape Social Media Discourse." *POLITICON: Jurnal Ilmu Politik* 5, no. 2 (2023): 163–194.
- Wijayanto, dan Nurul Hasfi. "Interpreting the Anger of President Joko Widodo : An Analysis in the Perspective of Javanese Political Culture." *Proceedings of the 5th International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries* (2020): 1–5.

Zulkarnain, A, dan Syamsuddin Harris. “DALAM MODEL KEPEMIMPINAN THE PHENOMENON OF BLUSUKAN IN THE ROLE OF POLITICAL LEADERSHIP OF JOKO WIDODO.” *POLITIK: Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan* 13, no. 1 (2017): 1928–1942.